

Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir Muara Fajar Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Esta Yuni Trisia Putri¹ Lilis Suriani²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kharudin Nasution No. 133 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia
estayunitrisiaputri@student.uir.ac.id lilissuriani@soc.uir.ac.id

Received : May 2, 2024;

Accepted : 30 Juli 2024

Abstract

Waste management in Pekanbaru City had not implemented a well-integrated concept from one stage to another. The TPA Muara Fajar in Pekanbaru still used an open dumping system. This causes pollution of the underground water system by leachate and the dominant direction of movement was in the north and west of the landfill. Currently the capacity of the TPA Muara Fajar was inadequate, so additional land was required. However, this cannot be implemented due to limited land for expansion, so the City of Pekanbaru need to provided new landfill land as a replacement for the Muara Fajar landfill, which began with conducted a location analysis. The aim of this research was to carry out supervision of the final processing site with an open dumping disposal system by the Pekanbaru City Waste Handling and Final Processing Section and the obstacles. The method used was descriptive and qualitative. The informants in this research were the Head of the Pekanbaru City Waste Handling and Final Processing Section, Supervisor, and Foreman TPA Muara Fajar. Data collection techniques were interviews, observation and documentation. This research concludes that the implementation of supervision over final processing sites used an open dumping disposal system by the Pekanbaru City Waste Handling and Final Processing Section was in the moderately successful category. The implementation of the waste processing system at the final disposal site was not yet fully running well due to weak supervision of officers, starting from the input of waste to the TPA Muara Fajar.

Key Words : Management, Waste, Final Disposal Site

Abstrak

Pengelolaan sampah di Pekanbaru belum menerapkan konsep yang terintegrasi dengan baik dari satu tingkat ke tingkat lainnya. TPA Muara Fajar Pekanbaru menggunakan sistem open dumping. Hal ini menyebabkan pencemaran air lindi pada sistem air tanah, terutama di bagian utara dan barat TPA, serta mengakibatkan TPA kekurangan kapasitas dan memerlukan tambahan lahan saat ini. Namun hal tersebut belum bisa terlaksana karena terbatasnya lahan untuk perluasan sehingga Kota Pekanbaru perlu menyediakan TPA baru pengganti. Tujuan penelitian ini adalah untuk memantau area pengolahan akhir dan hambatan dari pengolahan limbah dan sistem pembuangan terbuka di kota Pekanbaru. Metode yang digunakan bersifat deskriptif dan kualitatif; Informan penelitian ini adalah kepala, pengawas dan mandor TPA Muara Fajar Pekanbaru. Metode pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengendalian di titik-titik pengolahan akhir dengan menggunakan sistem pembuangan terbuka dari tempat pengolahan dan pengolahan akhir sampah Kota Pekanbaru cukup berhasil. Implementasi sistem pengolahan sampah di TPA Akhir belum berjalan sepenuhnya karena kurangnya pengawasan petugas mulai dari masuknya sampah ke TPA.

Kata Kunci : Pengelolaan, Sampah, Tempat Pembuangan Akhir

Pendahuluan

Kepadatan penduduk Pekanbaru dan perubahan pola konsumsi dengan berpenduduk hampir 1,5 juta jiwa, telah menyebabkan peningkatan volume sampah. Adanya industri, komersial, jasa dan kegiatan perkotaan lainnya juga menyebabkan jumlah sampah meningkat secara signifikan. Seperti kota lainnya, Pekanbaru juga mempunyai permasalahan seperti adanya tumpukan sampah di titik-titik penimbunan tidak terangkut dan sampah yang berserakan membuat pengguna jalan terganggu. Lemahnya penegakan hukum persampahan menunjukkan masih banyak warga kota yang masih membuang sampah sembarangan.

Pekanbaru memiliki TPA Muara Fajar dengan luas total 8,6 hektare yang terletak di Desa Muara Fajar Kecamatan Rumbai Pesisir yang berjarak kurang lebih 18,5 km dari pusat kota Pekanbaru, kurang lebih 1,2 km dari Desa Muara Fajar, dan + 300 meter dari rumah warga. TPA Muara Fajar menggunakan metode open dumping dimana sampah hanya dibuang begitu saja tanpa dipadatkan ke dalam tanah atau diolah lebih lanjut, hal ini menimbulkan bau, pencemaran air, dan berbagai penyakit. Dinas Lingkungan Hidup dan Sanitasi Pekanbaru berwenang menangani pengelolaan sampah dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Sanitasi Pekanbaru melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah kota di bidang Lingkungan Hidup dan Sanitasi. Pemerintah bertanggung jawab, dan dalam hal ini Departemen Lingkungan Hidup yang bertanggung jawab Kehidupan dan Sanitasi Kota Pekanbaru dan SKPD lainnya berdasarkan Peraturan 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Sanitasi Kota Pekanbaru, pada Pasal 15 memuat peraturan pengelolaan sampah ini menjelaskan tanggung jawab bidang pengelolaan sampah

Berdasarkan peraturan walikota, pengelolaan sampah dijelaskan sebagai salah satu fungsi sektor pengelolaan sampah yang memerlukan sistem pengelolaan komprehensif dan terpadu dari hulu hingga hilir. Selain itu, perlunya kejelasan hukum dalam pengelolaan sampah, tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah, peran masyarakat, dan dunia usaha, sehingga perlu adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur pengelolaan sampah. Pada tahun 2008 telah disahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru bekerja sama dengan pihak ketiga pengangkut sampah yaitu PT. Godang Tua Jaya (GTJ) dan PT. Samhana Cantik (SHI). Pemerintah Kota Pekanbaru telah melarang pembuangan sampah di tempat umum, jalan raya, dan pemukiman yang mencemari lingkungan dari segala jenis sampah dan menimbulkan berbagai penyakit. Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah Daerah Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 mengatur tentang sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar peraturan daerah tersebut, yang menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 71 Ayat 1 dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana. Denda sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Meski batas waktu membuang sampah ke tempat sampah diumumkan antara pukul 18.00 hingga 05.00, namun kondisi ini diperparah dengan masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah diluar waktu itu.

Menurut Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pekanbaru, sejauh ini belum ada upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan sampah tersebut, karena penumpukan

sampah terlihat di jalan-jalan yang cukup strategis. Hal lain terkait pemantauan TPA Muara Fajar di Pekanbaru antara lain sebagai berikut.

1. TPA Muara Fajar memiliki banyak sampah yang menumpuk akibat banyaknya sampah yang masuk setiap harinya, sedangkan pengelolaan sampah tidak dilakukan secara efisien dan teratur, serta petugas TPA membuang sampah begitu saja tanpa pengawasan langsung.
2. Berdasarkan observasi di lapangan, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah yang ditunjuk langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Sanitasi Pekanbaru untuk mengawasi pengelolaan sampah dan produksi kompos di TPA tidak bekerja efektif dan pengawas tidak pernah datang melakukan inspeksi atau pemantauan lapangan terhadap masalah TPA dan pengelolaan limbah serta identifikasi langsung terhadap produksi pengomposan yang tidak efektif.
3. Peralatan untuk mengolah sampah banyak yang rusak, seperti alat berat dan ekskavator, namun tidak efektif dan responsif sehingga mengakibatkan ketidakmampuan mengolah dan menumpuknya sampah.

Kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Pekanbaru adalah ketidakseimbangan jumlah sampah dan sarana pengolahan dibandingkan dengan kepadatan penduduk dan wilayah. Untuk kelancaran pengangkutan sampah apartemen, perkantoran, pertokoan dan rumah penduduk, maka perlu dilakukan pengambilan sampah dari jalan dan TPP tepat waktu dan diserahkan ke PA. Tempat pengangkutan sampah ini bekerja mulai pukul 06.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB sesuai shift/waktu di masing-masing kecamatan. Peta rute harian atau rute tempat pengangkutan sampah tiap kelurahan yang dikelola DKP.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan kebersihan, penanganan sampah, penataan taman dan pengelolaan TPA dilakukan oleh Dinas dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, dan Kelurahan. Pengawasan didasarkan pada Standar Operasional Prosedur. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah terdapat sub "Pengawasan" dalam Pasal 59 dikatakan bahwasanya hal yang termasuk Standar Operasional Prosedur pengawasan adalah pemantauan, penindakan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan.

Tinjauan Pustaka

Konsep Administrasi Publik

Administrasi adalah serangkaian kegiatan yang membimbing dan mengarahkan serta bertindak sebagai alat bagi organisasi tersebut (Atmosudirjo 2006:17). Manajemen mencakup setiap penyusunan dan penentuan fakta secara tertib dan sistematis guna memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai keterkaitan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain (Reksohadiprawiro, 2014:37). Pasolong (2019:2) menyebutkan siapa yang harus mengabdikan dan siapa yang harus diikuti, serta siapa yang harus mengatur dan diatur.

Administrasi publik adalah usaha lembaga publik untuk mengatur negara guna mencapai ketertiban, kemakmuran dan kesejahteraan (Salam 2007:176). Siagian (2013:7) mengartikan administrasi publik sebagai serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh pejabat publik untuk mencapai tujuan negara.

Konsep Organisasi Publik

Esta Yuni Trisia Putri dan Lilis Suriani

Menurut Siagian (2020:6), organisasi adalah segala bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih yang terhubung secara formal untuk mencapai tujuan bersama, dengan satu orang atau lebih sebagai pimpinannya. atau sekelompok orang yang disebut penguasa. Robbin (2008:4) menyatakan organisasi adalah entitas sosial yang diatur secara sadar dengan batas-batas yang relatif jelas dan beroperasi secara relatif terus menerus untuk mencapai tujuannya."

Konsep Manajemen Publik

Manajemen adalah ilmu dan seni melakukan tindakan untuk mencapai tujuan (Siswanto 2009:7). Menurut Hyman (Manullang, 2015:1), manajemen adalah fungsi pengendalian upaya individu untuk mencapai kegiatan orang lain dan mencapai tujuan bersama. Fungsi manajemen menurut Terry (2012:9) adalah perencanaan, organisasi, karyawan, untuk menginspirasi, dan kontrol.

Konsep Kebijakan dan Implementasi Kebijakan

Menurut Agustino (2016:139), implementasi adalah suatu proses dinamis, pelaksana suatu kebijakan melakukan beberapa tindakan atau kegiatan sehingga mencapai suatu hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri. Menurut Pressman dan Wildavsky (2012:20), "Implementasi kebijakan publik" berarti melaksanakan atau melaksanakan kebijakan dan menghasilkan produk-produk yang ditentukan dalam dokumen kebijakan untuk memenuhi janji-janji. Sedangkan Suharto (2010:7) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketentuan yang memuat prinsip-prinsip untuk memandu suatu tindakan yang terencana dan konsisten untuk mencapai tujuan tertentu.

Kebijakan publik merupakan upaya untuk mengembangkan nilai-nilai publik yang resmi, etis, dan mengikat secara moral yang bersumber dari kebijaksanaan pemerintah dan diarahkan pada akuntabilitas aktor publik di lingkungan pemerintahan (Islamy, 2009:5). Menurut Nugroho (2007:36-37), kebijakan publik adalah keputusan otoritas publik untuk mengatur kehidupan kolektif. Kebijakan publik bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan publik dan menyerap sumber daya publik.

Konsep Pemerintahan

Menurut Dwijowijoto (2008:58), kebijakan publik adalah suatu keputusan pemerintah sebagai strategi pelaksanaan tujuan negara. Kebijakan publik adalah strategi masuknya pertama kali ke dalam masyarakat dan awal mula terbentuknya Negara dan bertransisi menuju masyarakat yang lebih baik.

Menurut Thomas (Dwijowijoto, 2008:54) Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dilakukan pemerintah dan mengapa mereka bekerja sama untuk menghasilkan hasil yang membuat kehidupan tampak berbeda. Menurut Nugroho (2007:101), pengambilan kebijakan merupakan inti dari kebijakan publik, terlihat dari kebijakan publik untuk melakukan intervensi dalam memperbaiki kehidupan masyarakat.

Konsep Pengelolaan

Menurut Arikunto (2015:8), pengelolaan adalah substantifa dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Balderton (Adisasmita, 2011:21) menyatakan pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan,

mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Jogiyanto (2008:40), sistem adalah kumpulan beberapa elemen yang saling terintegrasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Konsep Tata Kelola Sampah

Menurut (Sudrajat 2006:15), pengelolaan sampah dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak lagi berbahaya atau mengkhawatirkan bagi pemanfaatan atau pengolahannya. Pembuangan limbah ini perlu diatur agar tidak membahayakan kesehatan manusia. Dalam hal ini, hal-hal berikut harus diperhatikan dalam pengelolaan sampah adalah penyimpanan, pengumpulan, pembuangan akhir sampah, dan pengolahan sampah

Tempat Pengolahan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat pengolahan dan pengembalian sampah dengan cara yang ramah lingkungan dan aman bagi manusia dan lingkungan hidup. Metode pengelolaan limbah adalah pakan ternak, Terbakar (burning), TPA sanitasi, Pupuk (pupuk), Tuang ke saluran pembuangan, Dumping (akumulasi), Membakar individu, Daur ulang, dan Kurangi Limbah (Azwar, 2006:8)

Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu berdasarkan pengamatan penulis di lapangan, melalui pengumpulan data, klarifikasi dan analisis, untuk mengetahui keadaan sebenarnya pada saat penelitian, dan merumuskan secara analitis permasalahan yang dihadapi. dapat diambil.

Penelitian ini dilakukan di bagian pengolahan limbah dan pengolahan akhir Pekanbaru, karena merupakan organisasi yang mengawasi tempat pengolahan akhir dengan sistem pembuangan terbuka dan mengalami permasalahan dalam pengolahan limbah.

Penelitian menggunakan informan yaitu orang yang di dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan di teliti (Moleong 2015:163).

Informan utama penelitian ini adalah Kepala Bidang Pengolahan dan Pengolahan Akhir Limbah Pekanbaru. Informan selanjutnya penelitian ini adalah Pengawas TPA Muara Fajar, Mandor TPA Muara Fajar, Operator Timbangan, dan 2 orang masyarakat sebagai pemulung. Penentuan informan di pilih secara purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Pertimbangan tertentu yang di maksud adalah memilih sumber data atau orang yang di anggap paling tahu tentang apa yang di harapkan. Teknik pengumpulan data primer dan sekunder dalam penelitian ini menggunakan Observasi, Percakapan, dan Dokumen

Analisis data adalah proses pengelompokan, pengurutan, dan manipulasi serta dekonstruksi data agar lebih mudah dibaca. Dalam analisis data, data dokumen dihubungkan dan dilengkapi dengan data wawancara.

Menurut Sugiyono (2019:335) analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.

Hasil dan Pembahasan

Informan yang terlibat dalam penelitian ini berjumlah 6 orang yaitu Kepala Seksi Penanganan Dan Pemrosesan Akhir Sampah, Pengawas TPA Muara Fajar, Mandor TPA Muara Fajar Pekanbaru, Operator Timbangan di TPA Muara Fajar Pekanbaru, 2 orang masyarakat sekitar yang berprofesi sebagai pemulung, Berdasarkan keterangan informan, peneliti memperoleh informasi-informasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai.

Hasil Penelitian Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pengelolaan Sampah pada Pasal 18 angka 1 bertujuan agar pengelolaan sampah bermanfaat secara ekonomi, menyehatkan masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta mengubah perilaku masyarakat. Selain itu, tujuan undang-undang ini adalah untuk mengurangi dampak negatif sampah terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Pola konsumsi masyarakat berkontribusi terhadap semakin banyaknya sampah yang dihasilkan, termasuk sampah kemasan yang berbahaya dan sulit terurai secara alami. Sebagian besar masyarakat saat ini masih memandang sampah sebagai sampah yang tidak berguna dibandingkan sumber daya lain. Dalam pengelolaan sampah, masyarakat mengandalkan metode end-to-end di mana sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang di tujuan akhir, meskipun sampah dalam jumlah besar menumpuk di tempat pengolahan akhir yang melepaskan gas metana dan dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca serta berkontribusi terhadap pemanasan global.

1. Penyimpanan

Memilah dan memilah sampah berdasarkan jenis, jumlah dan karakteristiknya, serta penyimpanan sampah. Penetapan standar merupakan ketentuan baku dalam pelaksanaan pengendalian sampah, merupakan ukuran dan model pelaksanaan yang jelas, logis, masuk akal, dan praktis untuk menjamin ketentraman masyarakat. Secara teori, posisi baku setiap strategi yang digunakan dalam pelaksanaan pengendalian adalah kejelasan, hasil, dan harapan pencapaian tujuan dan sasaran pekerjaan serta perencanaan. Pengendalian adalah proses menentukan apa yang harus dicapai, seperti standar, dan apa yang harus dicapai. sedang dilakukan. Ini adalah implementasi dan perubahan dilakukan sesuai kebutuhan untuk memastikan implementasi sesuai rencana, yaitu sesuai arahan. Standar yang ditetapkan berfokus pada pembuangan sampah yang teratur dan benar, pengolahan sampah yang benar, pembuatan kompos dan daur ulang sampah. Penyimpanan sampah tidak terlaksana dengan baik, terlihat dari beberapa tempat penyimpanan sampah yang tidak selalu bersih bahkan tidak dibersihkan dapat menimbulkan bau tidak sedap karena keterlambatan harian dan tidak bekerjanya staf kebersihan.

a. Pengangkutan Sampah

Pengangkutan sampah adalah bagian persampahan yang bersasaran membawa sampah dari lokasi pemindahan atau dari sumber sampah secara langsung menuju tempat pemrosesan akhir (TPA). Dengan optimasi sub-sistem ini diharapkan pengangkutan sampah menjadi mudah, cepat, penugasan terhadap supir jelas serta biaya relatif murah.

Kebijakan program persampahan didasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah. Misalnya saja kebijakan peningkatan kualitas cakupan layanan dan sistem manajemen. Tingkat pelayanan saat ini sebesar 40% berarti banyak TPP yang tidak terangkut dan masyarakat membuang sampahnya di lahan terlantar/sungai. Banyak warga masyarakat yang tidak menerima layanan pengumpulan sampah yang memadai.

b. Tempat Penyimpanan

Tempat penyimpanan adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengelolaan, dan /atau tempat pengelolaan sampah terpadu. Di lokasi dapat dilihat perilaku masyarakat dalam membuang sampah dimana perilaku tersebut tentu akan berdampak pada kondisi lingkungan. Sejumlah perencanaan telah dikembangkan untuk menerapkan kebijakan ini, antara lain Optimalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana persampahan, Perluasan cakupan layanan yang terencana dan merata, Meningkatkan kapasitas fasilitas persampahan sesuai dengan target pelayanan. Remediasi tempat pembuangan sampah yang mencemari lingkungan. Meningkatkan kualitas pengelolaan TPA menuju Sanitary Landfill. Meningkatkan pengelolaan TPA regional. Penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi pengelolaan sampah yang efisien dan ramah lingkungan

2. Pengumpulan

Pengumpulan sampah berupa pengumpulan sampah dari sumber sampah, pemindahan ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu. Mengukur dan mengamati pekerjaan yang sedang berjalan, melaporkan perkembangan proses pengelolaan, dan melaksanakan kegiatan pemantauan sampah. Artinya bagaimana para pelaksana mentaati aturan dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Para pelaksana kebijakan harus menyadari bahwa pihak lain yang terlibat dalam penerapan kebijakan tersebut juga mematuhi hukum. Dalam konteks lain, ketika terdapat otoritas formal, sering terjadi kesalahan penilaian terhadap efektivitas otoritas, dan kenyataan merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan.

a. Pemilahan sampah

Pemilahan sampah yaitu kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah. Pemilahan sampah di sekolah atau di rumah bisa dikelompokkan menjadi sampah organik, sampah anorganik dan sampah residu. Masih sangat sedikit masyarakat (sekitar 13% dari total penduduk) yang memisahkan sampah untuk dipilah dalam skala perumahan dan perumahan, dan cenderung mencampurkannya dalam satu wadah. Proses pemilahannya di beberapa tempat, masih sebatas pemilahan wadah, sedangkan proses pengangkutan sampah masih berupa kombinasi organik dan anorganik. Hal ini menyebabkan masyarakat enggan memilah

sampah rumah tangga. Inefisiensi pengelolaan sampah dimulai pada tahap klasifikasi ini. Apabila pemilahan dilakukan dengan benar, maka pengelolaan sampah selanjutnya akan lebih efektif dan efisien. Tahapan selanjutnya memerlukan keterpaduan dan koordinasi, sehingga pencampuran kembali sampah yang semula dipisahkan dari sumber sampah tidak terjadi, dan proses pemilahan tidak berpengaruh pada pengurangan sampah dan pengolahan sampah.

b. Pengumpulan Sampah

Pengumpulan sampah adalah proses penanganan sampah dengan cara pengumpulan dari masing-masing sumber sampah untuk diangkut ke tempat pembuangan sementara, atau langsung ke tempat pembuangan atau pemrosesan akhir tanpa melalui proses pemindahan. Pengumpulan sampah menggunakan suatu wadah yang keberadaannya untuk menampung sampah warga di sekelilingnya atau sekitarnya, baik itu lokasi dan kapasitasnya menyesuaikan dengan jumlah potensi sampahnya.

Pengumpulan sampah di TPA Muara Fajar Pekanbaru saat ini diolah menjadi tempat pembuangan sampah sanitasi. Proses adalah elemen sistem yang bertanggung jawab untuk memproses atau mengubah seluruh masukan menjadi sesuatu yang lebih berguna. Proses disini adalah mengolah sampah yang dibuang ke TPA dan dilakukan oleh Unit Pengolahan dan Pengolahan Akhir Sampah.

3. Pembuangan Akhir Sampah

Pembuangan akhir sampah adalah tempat untuk mengkarantina (menyingkirkan) sampah kota sehingga aman. Tempat pembuangan akhir sampah merupakan terminal terakhir dari proses pewadahan, pengumpulan, pengangkutan yang diproses lebih lanjut dengan pemusnahan Pengolahan akhir limbah, dan pengembalian limbah dan/atau residu yang aman dari pengolahan sebelumnya ke lingkungan. Tindakan perbaikan penyimpangan merupakan langkah tindakan yang bertujuan untuk mengidentifikasi kekurangan dalam pelaksanaan pengendalian parkir dan memberikan cara untuk menafsirkan dan menjelaskan mengapa penyimpangan pengendalian terjadi. Salah satu masalah terbesar dari TPA sanitasi adalah bahaya lingkungan. Bahan-bahan dalam lapisan sampah yang dipadatkan akan terurai, menghasilkan gas seperti metana yang mudah terbakar. Namun gas metana yang dihasilkan dari teknik TPA yang higienis dapat dimanfaatkan sebagai sumber listrik untuk rumah-rumah masyarakat.

a. Adanya pemantauan

Pengelolaan sampah di Pekanbaru belum menerapkan konsep yang terintegrasi dengan baik dari satu tingkat ke tingkat lainnya. Hal ini juga menimbulkan banyak permasalahan, seperti pemilihan tempat sampah dan kategori sampah yang tidak tepat, tidak efektifnya penimbunan sampah di TPP, pengumpulan dan pengangkutan sampah yang tercampur, dan kegagalan dalam mengoptimalkan pengelolaan sampah.

Pengurangan sampah akibat operasional TPA. Pemantauan sampah dilakukan dengan menyaring sampah menggunakan saringan sampah diameter pori 0,5 cm, lalu mengeringkan dan membersihkan sampah dari air dan pasir, lalu memilah sampah berdasarkan klasifikasi sampah, di tiap transek, Identifikasi sampah dan hitung serta timbang sampah, hitung sampah, kelompokkan ukuran sampah.

b. Adanya Evaluasi

Upaya membandingkan dan menafsirkan hasil yang ada dengan standar yang disyaratkan melibatkan evaluasi sejauh mana kinerja inspeksi menyimpang dari standar dan membandingkan alasan penyimpangan tersebut. Tindakan korektif dapat diambil sebelum pemeriksaan sebenarnya.

Pengelolaan akan optimal apabila seluruh aspek pengelolaan seimbang dan saling mendukung. Dari segi pengelolaan sampah, evaluasi pengelolaan sampah dilakukan pada setiap aspek seperti organisasi, hukum, pembiayaan, teknis dan operasional, serta partisipasi masyarakat. Semua aspek tersebut berkaitan erat dan harus dipahami dengan jelas agar tujuan pengelolaan sampah dapat tercapai, yaitu meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah.

4. Pengolahan Sampah

Pengolahan berupa perubahan sifat, komposisi dan ukuran sampah. Pengelolaan sampah yang baik umumnya diterapkan dalam sistem pengelolaan sampah terpadu yang bersifat top-down, termasuk potensi dampaknya. Sampah yang merupakan sisa aktivitas manusia perlu dikelola dengan baik agar tidak mencemari lingkungan, menyebarkan penyakit, mengganggu estetika, serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan manusia dan lingkungan. penyakit.

Sampah-sampah yang tidak dikelola dengan benar akan berpengaruh besar terhadap lingkungan hidup yang berada disekitarnya, dimana sampah akan menimbulkan beberapa dampak negatif dan bencana seperti dampak Terhadap Kesehatan, rusaknya Lingkungan, terjadinya Banjir, dampak Terhadap Keadaan Sosial dan Ekonomi

a. Unit pengolahan rumah kompos

Keberadaan Rumah Kompos sebagai alternatif penanganan sampah khususnya sampah organik di area masyarakat guna meredam ledakan di TPA Muara Fajar, Unit Pengolahan dan Pengolahan Akhir Sampah akan melakukan pengolahan gas metana. Pengolahan gas metana dapat mengurangi risiko dan mencegah ledakan gas metana. Gas metana sebenarnya merupakan gas yang berbahaya karena merupakan salah satu efek rumah kaca dari pemanasan global. Selain dapat mengurangi efek rumah kaca dengan memanfaatkan gas metana sebagai sumber energi alternatif, gas metana ini juga dapat mengurangi dampak pencemaran lingkungan akibat penumpukan sampah.

Unit Pengelola Kompos Kota Pekanbaru dan TPST-3R belum beroperasi maksimal karena banyaknya peralatan yang rusak, serta belum mampu mereduksi sampah. Muatan sampah diangkut ke TPA Muara Fajar.

b. Bank sampah

Bank sampah adalah tempat untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan disetorkan ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat pengepul sampah. Tujuan dari bank sampah adalah sebagai sarana edukasi pengelolaan sampah bagi warga melalui 3R yaitu Reduce, Refuse, Recycle. Seluruh masyarakat dihimbau untuk mengurangi dan menggunakan ulang kemasan ramah lingkungan untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. Meskipun ada sumber daya untuk melaksanakan kebijakan bank sampah, pelaksana harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemauan berbuat, namun karena lemahnya birokrasi maka tugas tersebut tidak terlaksana. Kebijakan yang kompleks memerlukan kerja sama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak sesuai dengan kebijakan yang ada, beberapa sumber daya menjadi tidak efisien dan menghambat implementasi kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana kebijakan harus mengkoordinasikan dan mendukung kebijakan yang diputuskan secara politik.

Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Sampah

Sumber daya manusia merupakan unsur penting dalam penerapan sistem tersebut. Staf CIA Muara Fajar masih kurang dari segi kuantitas dan kualitas. Tingkat pendidikan 2 orang tenaga honorer hanya tamatan SMA. Selain itu, penanggung jawab masalah ini hanya ada 1 orang, dan sering bolos kerja,

Sarana dan prasarana yang kurang memadai, seperti peralatan berat yang dibutuhkan untuk meratakan dan mengubur sampah. Alat berat yang dimiliki berjumlah 10 unit, dimana 5 unit dalam kondisi berat, 4 unit rusak ringan, dan 1 unit dalam kondisi baik. Namun hanya 1 unit yang berfungsi dengan baik. Tahapan pemeliharaan dan perbaikan peralatan diperlukan untuk melanjutkan pengoperasian sistem pengolahan limbah dengan penerapan teknologi modern.

Kesimpulan

Pengelolaan sampah TPA Muara Fajar Dinas Lingkungan Hidup dan Sanitasi Kota Pekanbaru tergolong kurang optimal. Diketahui masih terdapat permasalahan terkait sampah yang dibuang di TPA Muara Fajar tidak dapat diolah secara langsung sehingga menimbulkan penumpukan sampah dan tidak dapat diolah secara efektif, namun pihak berwenang terkait tidak menyelidiki secara langsung permasalahan di TPA tersebut.

Menurut Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, faktor penghambat pengelolaan sampah di TPA Muara Fajar adalah kurangnya sumber daya manusia yang kurang baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga infrastruktur tidak

didukung oleh kegiatan pemeliharaan dan perbaikan peralatan. Oleh karena itu, pengolahan sampah di PA Muara Fajar Pekanbaru terhambat karena peralatan yang rusak.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal:

- Adisasmita. 2011. Manajemen Pemerintah Daerah. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu..
- Agustino, Leo. 2016. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2015. Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta
- Atmosudirjo, S. Prajudi. 2006. Administrasi dan Manajemen Umum. Jilid II. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Azwar, Azrul. 2006. Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan, Jakarta Yayasan Mutiara
- Dwijowijoto, R.N, 2008, Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Islamy, M. Irfan. 2009. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta. Sinar Grafika
- Jogiyanto. 2008. Analisis dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur. Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis. Yogyakarta: Andi.
- Manullang, Marihot. 2015. Manajemen Personalia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Moleong, Lexy J. 2017. Metode Penelitian Kualitatif, cetakan ke-36, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Nugroho, Rian D. 2007. Kebijakan Publik Negara-negara Berkembang. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pasolong, H. 2019. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Pressman, Jeffrey L. and Wildavsky, Aaron B.. 2012. Implementation. University of California Press
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.

- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.
- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah.
- Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.
- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja

Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).

- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi.
- Hamim, S. (2005). Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). Perilaku dan Etika Administrasi Publik. *Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing*.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.

- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Muliando, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.
- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).
- Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163-175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap

Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.

- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogya, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.

- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.

- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menangulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.
- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.
- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia"* (pp. 165-177).
- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".
- Yunisman, Y., Salioso, H., Febrianto, S., Prayuda, R., & Mardatillah, A. (2022). Analysis of quality of animal health services by veterinary medical and veterinary paramedic services in food security and agricultural agency of Rokan Hilir Regency. *International Journal of Health Sciences*, 14(3), 1030-1046.
- Larasati, D., Indrastuti, S., Salioso, H., Yussa, H. A., & Suri, D. M. (2022). Analysis of the effect of job satisfaction and job motivation on the performance of cleaning officers at the environmental service agency Rokan Hilir district Indonesia. *International Journal of Health Sciences*, 6(4), 573-588.
- Salioso, H. (2016). ASN, OTDA, Politik Pilkada Serentak dan Korupsi di Indonesia. *SISI LAIN REALITA*, 1(1), 01-07.
- Adha, M. L., & Salioso, H. (2024). KINERJA ORGANISASI DI KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BASARNAS KELAS A PEKANBARU. *JURNAL*

KEMUNTING, 5(1), 1-16.

- Askarial, A., Rinaldi, K., & Salioso, H. (2016). Kota Dumai Dalam Pidato Seorang Walikota.
- Reksohadiprawiro, Munawardi. 2014. *Administrasi Perkantoran*. Tangerang: Universitas Terbuka.
- Robbin Stephen P., 2008, *Perilaku Organisasi*, Prenhlindo, Jakarta.
- Salam, Dharma Setyawan. 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Siagian, P. Sondang. 2013. *Administrasi Pembangunan Konsep dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara
- Siagian, S. 2020. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta; Bumi. Aksara.
- Siswanto, H. B. 2009. *Pengantar Manajemen*, Jakarta, Bumi Aksara
- Sudrajat, HR. 2006. *Mengelola Sampah Kota*, Jakarta: Penebar Swadaya.
- Suharto, Edi, 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Refika Aditama, Bandung.
- Terry, George R. 2012. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 106 Tahun 2016